



PENGESAHAN RAPERDA

Aturan Menara Masih Diperdebatkan

UMBULHARJO—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik rencananya disahkan dalam sidang paripurna Jumat (12/5) lusa. Namun raperda tersebut masih diperdebatkan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Jogja, Prima mengatakan belum ada pemberitahuan paripurna untuk Raperda soal Menara Telekomunikasi untuk besok lusa, kecuali paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI). "[Soal menara telekomunikasi] pimpinan Dewan masih perlu berkomunikasi dengan fraksi-fraksi dahulu," kata Prima, Selasa (9/5).

Anggota Badan Musyawarah Dewan, Nasrul Khoiri pun mengakui biasanya maksimal satu pekan sebelum raperda disahkan jadwalnya sudah masuk bamus untuk diagendakan. Namun hal itu bisa dilakukan dengan kewenangan khusus pimpinan Dewan.

Nasrul selaku anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai secara substansi Raperda Menara Telekomunikasi sudah tidak ada persoalan kecuali hanya teknis penjadwalan paripurna. "Kami

Menara Telekomunikasi di Kota Jogja

Kondisi lapangan

- Menara yang berizin 104 menara.
- Hasil pendataan Panitia Khusus Raperda tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi ada 222 menara.

Jenis menara

- Menara telekomunikasi jenis greenfield atau menara yang ditanam di tanah
- Menara jenis rooftop atau menara yang dipasang di atas bangunan.
- Monopol atau mikrosel.

Ditah dari berbagai sumber

dari PKS sudah bersikap yang paling pas memang harusnya segera disahkan supaya ada kejelasan," kata Nasrul.

Ketika raperda itu sudah disahkan, kata dia, menjadi acuan Pemerintah Kota dalam menertibkan menara-menara yang tidak berizin. Pemerintah Kota juga sudah menyanggupi untuk menertibkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah raperda itu disahkan.

Adapun, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Danang Rudiarmoko berkeyakinan pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi batal disahkan besok lusa. Alasannya, karena masih banyak menara yang belum ditertibkan. Ia mengapresiasi upaya Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah menyegel menara di

Jalan Veteran Umbulharjo. Danang meminta tindakan serupa juga dilakukan Satpol PP terhadap menara lainnya. "Kami butuh ketegasan dalam penertiban menara," kata Danang. Pihaknya juga mengusulkan segera membentuk tim pengawas penertiban menara yang anggotanya terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Raperda Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik sebelumnya akan disahkan 20 Maret lalu, namun tertunda dengan alasan masih banyak menara yang belum ditertibkan. Dalam perjalanan pembahasan panitia khusus (Pansus) menara-menara kembali bermunculan meski tidak ada izinnya. Jumlah menara yang berizin di Jogja hanya 104 unit. Sementara yang ada saat ini sekitar 222 unit menara. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005